

Judul : Sesuai amanat UU, PPG wujudkan guru profesional
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sesuai Amanat UU

PPG Wujudkan Guru Profesional

PEMERINTAH menargetkan sebanyak 800 ribu guru di seluruh Indonesia dapat menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus memenuhi syarat memperoleh tunjangan sertifikasi.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menyatakan, penyelesaian program PPG merupakan amanat Undang-Undang yang harus dituntaskan. Agar para guru bisa menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang (UU).

"Dari informasi kami, tahun ini akan diadakan PPG sasarannya 800 ribu, mudah-mudahan tahun ini selesai," terang Ferdiansyah pada acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG Bagi Guru Tertentu di Cipanas, Kabupaten Garut,

Jawa Barat, Minggu (3/8/2025).

Dia menegaskan, Komisi X bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong seluruh guru yang belum mengikuti PPG agar segera mendaftar. PPG merupakan jalan utama bagi guru untuk memperoleh sertifikasi yang diatur dalam regulasi nasional.

Dia mengingatkan, meski program ini sudah disosialisasikan secara luas, masih banyak guru yang belum paham atau belum melengkapi persyaratan administrasi, sehingga belum bisa mengikuti PPG. Padahal, sertifikasi merupakan syarat penting yang tak bisa ditawar.

"Karena ini amanat Undang-Undang, semua guru, termasuk dosen harus bersertifikasi," tegas politikus asal Dapil Jawa Barat XI itu.

Ferdiansyah menyebut, kegia-



Ferdiansyah

tan sosialisasi seperti di Garut merupakan bentuk pendampingan agar guru tak lagi kebingungan soal teknis pendaftaran dan kelengkapan dokumen. Di

daerah, informasi belum merata sampai ke semua guru.

"Kami ingin menuntun para calon yang belum mengikuti PPG, bagaimana pengajuan, dan administrasi, semua disampaikan kepada guru yang sasarannya sedang mengajar," ujar sekretaris Fraksi Golkar MPR itu.

Dia mengungkapkan, persoalan guru yang belum PPG tidak hanya terjadi di Garut, tapi tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Garut, data terakhir menyebutkan ada 3.868 guru dari jenjang TK hingga SMP yang belum mengikuti program tersebut.

Ferdiansyah mendorong Pemerintah Kabupaten Garut aktif mengusulkan nama-nama guru yang belum PPG agar didaftarkan ke Pemerintah Pusat. Apalagi, Garut punya modal kuat karena memiliki perguruan tinggi penyelenggara PPG.

"Tahun ini di Garut mudah-

mudahan bisa selesai, maka pemda harus mendorongnya cepat-cepat, siapa yang terlambat siapa yang tertinggal," katanya.

Senada, anggota Komisi X DPR Hoerudin Amin mendorong agar tidak ada pungutan liar dalam proses PPG. Gaji guru cukup kecil, jangan lagi dibebani biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Apalagi ada praktik PPG yang tidak terbuka dan kerap kali dinilai berdasarkan kedekatan, bukan kualitas.

Dia menegaskan, fraksinya akan terus berjuang bersama para guru, dan memastikan mereka mendapatkan tempat yang mulia dalam sistem pendidikan nasional.

"Karena hanya dengan guru yang sejahtera dan bahagia, kita bisa menyilapkan masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik," ucap politikus Partai Amanat Nasional itu. ■ PYB